

**Judul** : Hukum mesti dijauhkan dari politik  
**Tanggal** : Senin, 11 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

# Hukum Mesti Dijauhkan dari Politik

*Fenomena belakangan menunjukkan sinyal adanya calon presiden yang difavoritkan pemerintah, sedangkan calon lainnya cenderung dijegal.*

**THEOFILUS IFAN SUCIPTO**  
[redaksi@mediaindonesia.com](mailto:redaksi@mediaindonesia.com)

**M**UNCULNYA kasus lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang terjadi pada bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai memuat niat terselubung. Dugaan upaya penjegalan tidak bisa dikesampingkan. Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai upaya mengadakan pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan itu untuk berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Para kandidat disaring hingga hanya yang ada di barisan tertentu yang bisa berkompetisi.

Saut menangkap sinyal ada calon presiden yang difavoritkan pemerintah, sedangkan calon lainnya cenderung dijegal.

"Dalam tiga hingga empat

tahun ini ada favoritisme pada yang lain, tapi bahkan sama sekali tidak pada calon ini. Naif dong kalau bilang tidak ada politiknya?" ujar Saut dalam diskusi virtual *Crosscheck* berjudul *Obok-Obok Kasus Masa Lalu Jelang Pemilu*, kemarin.

Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru-baru ini dipanggil KPK terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2012. Cak Imin sempat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2009 hingga 2014.

Saut mengatakan berkaca dari yang dialami Cak Imin, penegakan hukum terkesan sarat kepentingan politik. Ia membandingkan sikap KPK saat ini dengan eranya menjabat. Kala itu, pimpinan KPK sepakat menunda pengusutan dugaan kasus peserta pemilu menjelang pesta demokrasi.

"Dalam konteks ini kita

ingin hati-hati ketika ada kontestasi. Toh kita tidak akan kiamat," papar dia.

Saut mengajak seluruh pihak mengawasi dan melawan masuknya kepentingan politik dalam proses hukum. Pakar hukum tata negara Refly Harun juga mengingatkan urusan hukum harus bebas dari politik. Lembaga penegak hukum diharapkan mampu menjaga integritas, independensi, dan muruahnya.

"Orang bilang KPK independen, ya dulu. Sekarang orang paham itu dijadikan alat politik," papar dia.

Refly mengaku pernyataan tersebut bukan opini dirinya, melainkan hasil survei oleh Voxpol Center yang menyebutkan mayoritas masyarakat percaya penegakan hukum untuk kepentingan politik.

Di sisi lain, menunda proses hukum dugaan korupsi terhadap peserta pemilu, menurut Refly, dilematis. Para aktivis antikorupsi jelas akan mempertanyakan.

Sebaliknya, bila yang dikuak sudah lama terjadi, tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Bahkan, menimbulkan asumsi bahwa proses hukum se-

seorang bisa dicari-cari.

"Apalagi menersangkakan orang mudah sekali di republik ini, dari kasus korupsi atau menyebar berita bohong yang paling gampang," ujarnya.

Refly pun mengajak publik melihat dari kacamata yang lebih luas. Tujuan utamanya ialah menjauhkan proses hukum dari politik.

## Penjegalan

Di kesempatan yang sama, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan upaya menjegal Anies sudah sempat dilakukan. Namun, Anies lolos dari penjegalan karena tidak ditemukan bukti yang cukup.

"Menjegal Cak Imin, itu yang (kini) diupayakan," ujar Rocky.

Ia meragukan KPK punya inisiatif sendiri mengulik kasus di Kemenaker itu. Pemeriksaan yang terkesan mendadak pada Cak Imin memancing dugaan ada pihak yang menggerakkan.

"Mesti kita anggap ada *mastermind* yang menggerakkan KPK supaya melakukan aktivitas pemeriksaan yang konyol semacam ini," tandas Rocky. (P-2)